DINAMIKA HUBUNGAN AUSTRALIA-ASIA TIMUR (1997–2005)[1]

Oleh:
Adriana Elisabeth

Abstract

In this summary, Australia-East Asian relations cover Australia bilateral, regional and multilateral relations with Cina, Indonesia, Japan and Singapore during 1997-2005. In this regard, there are five strategic issues, which have impacts to these relations. They are trade and investment, energy security, international migration, bioterrorism, and border issues. Australia-East Asian relations is also affected by the Asian Crisis in 1997, and domestic political conditions in individual East Asian countries, particularly Indonesia.

Hubungan Australia-Asia Timur sudah dimulai sejak 1850, ditandai oleh kedatangan para imigran Cina yang bekerja di pertambangan emas di Australia. Fakta tersebut bukanlah satu-satunya faktor yang mendorong perhatian Australia terhadap Cina, melainkan juga karena kemenangan/pengaruh Partai Komunis Cina pada abad ke-20 yang dianggap sebagai ancaman bagi Australia. Dengan demikian, bagi Australia, Cina bukan hanya membahayakan secara ekonomi, melainkan juga secara politik dan keamanan.

Politik dan keamanan internasional ketika itu juga dipengaruhi oleh Perang Dunia II, yakni perseteruan negara-negara Barat dengan Jepang. Australia yang menjadi sekutu Barat mendukung sistem pertahanan negara-negara besar—Amerika Serikat (AS) dan Inggris—di Asia Tenggara. Pemerintah Australia menempatkan pasukannya di Singapura untuk mempertahankan Singapura dari kekuasaan Jepang. Karena kebijakan itu, Australia harus kehilangan lebih dari 1800 tentaranya karena terbunuh, meskipun Singapura pun harus jatuh ke tangan Jepang pada 1 Februari 1942.[2]

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, hubungan Australia-Jepang lebih banyak didominasi oleh kepentingan ekonomi. Saat ini Jepang masih menjadi negara tujuan ekspor Australia kedua terbesar setelah AS. Jepang juga merupakan mitra dagang Australia yang penting di bidang energi, terutama untuk mendukung kebutuhan industri baja Jepang. Selain mengimpor besi, Jepang juga mengimpor uranium dari Australia. Pada saat ini, cadangan uranium Australia berjumlah 40 persen dari produksi uranium dunia.[3]

Australia yang menganut konsep pertahanan aliansi di bidang keamanan (*achieving security through alliances*),[4] berupaya mempertahankan kehadirannya di Asia dengan menjadi anggota organisasi pertahanan regional Asia Tenggara, *South East Asia Treaty Organisation* (SEATO)—yang secara resmi berdiri pada 1954. Selanjutnya, Australia memperluas keterlibatannya di Asia dengan menjadi mitra dialog (*dialog partner*) *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) pada 1974 untuk membahas persoalan-persoalan pertahanan, politik, ekonomi, dan sosial yang berdampak pada stabilitas dan keamanan regional.[5] Hubungan

[1] Penelitian dengan judul tersebut dilakukan oleh tim yang beranggotakan Adriana Elisabeth, Trinuke Pudjiastuti, Ikrar Nusa Bhakti, Mohamad Roem, dan Athiqah Nur Alami.

[2] Gary Quinlan (19 Mei 2005). "Australia-Singapore Relations", Pidato Quinlan sebagai High Commissioner pada *the Australian chamber of Commerce*, Singapura, hlm. 1

[3] http://www.investmentu.com/uranium.html, hlm. 7. Cadangan uranium Kazakhstan sebesar 17 persen, Kanada: 12 persen, Afrika Selatan: 8 persen, Federasi Russia: 4 persen, sedangkan AS, Uzbekistan dan lain-lain, masing-masing 3 persen.

[4] "Australia-Asia Relations during the Cold-War, Forward Defence", www.china-biz.org, hlm. 1

[5] Negara-negara partner dialog ASEAN: AS, Cina, India, Jepang, New Zealand, Kanada, Korea Selatan, Rusia, dan Uni Eropa.

ekonomi Australia-ASEAN bermula dari runtuhnya pasar Inggris, Australia, pun menilai Asia sebagai pasar potensial. Pasar ASEAN saat ini dipenuhi oleh sekitar 9—10 persen produk ekspor Australia atau pasar terbesar kedua untuk produk–produk manufaktur dan pasar terbesar keempat untuk semua produk Australia.

Masyarakat Australia yang dibentuk dari komunitas migran internasional tercatat sebagai salah satu negara tujuan para migran dari berbagai penjuru dunia. Komunitas migran Australia tetap didominasi oleh para migran dari negara-negara Eropa (Inggris), namun kedatangan bangsa-bangsa Asia, khususnya dari Indocina menjadi persoalan migrasi tersendiri bagi Australia, khususnya berkaitan dengan kepentingan ekonomi Australia. Para imigran yang masuk ke Australia termasuk dalam kategori *unskilled workers* dan dapat membahayakan komposisi penduduk Australia. Untuk itu, pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan politik kependudukan untuk membatasi ruang gerak para migran asal Asia dengan menetapkan *the White Australia Policy*. Namun pada 1970-an terjadi perubahan besar-besaran dalam komposisi migran internasional di Australia yang ditandai dengan peningkatan imigran dari Asia secara drastis. Kemampuan migran dari Asia untuk menguasai berbagai kegiatan bisnis secara tidak langsung mematahkan kebijakan tersebut.

Perdebatan mengenai identitas warna kulit terus berlangsung dan sempat melahirkan *Hansonian Syndrome* pada pertengahan 1990-an. Sampai saat ini pun masih ada sentimen anti-Asia dalam kehidupan sosial politik baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat di Australia. Meskipun perkembangan politik dalam negeri Australia diwarnai persoalan anti-pendatang (anti-Asia), Australia tetap melanjutkan hubungan luar negerinya dengan negara-negara di kawasan Asia Timur.

Australia memandang penting hubungannya dengan Indonesia karena posisi strategis Indonesia, terutama dalam mendukung kepentingan ekonomi dan perdagangan Australia melalui jalur laut di kawasan Indonesia bagian timur menuju dan dari kawasan Asia Timur dan Timur Tengah. Selain itu, Indonesia merupakan pasar bagi produk hasil pertanian Australia dan kepentingan investasi Australia, khususnya di sektor pertambangan. Dengan kesepakatan negara-negara di dunia untuk melakukan perdagangan bebas, maka Australia pun cenderung meningkatkan hubungan ekonomi, khususnya di bidang perdagangan melalui kerja sama atau kesepakatan perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*). Di tingkat subregional, Australia dan Indonesia telah membentuk *Australia Indonesia Development Area* (AIDA) pada tahun 1986, yang dikhususkan untuk pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sementara itu, di daerah-daerah perbatasan juga dibangun kerja sama ekonomi, seperti antara Indonesia (Batam) dengan Singapura melalui kerja sama daerah ekonomi khusus atau *Special Economic Zone* (SEZ) sejak tahun 2006. Kerja sama SEZ antara Indonesia dengan Singapura dilakukan dalam rangka mendukung FTA antara Australia dengan Singapura (*Australia Singapore Free Trade Agreement*/ASFTA).

Perkembangan Isu-isu Strategis dalam Hubungan Australia-Asia Timur

Sejak akhir 1990-an, hubungan politik dan ekonomi Australia-Asia Timur dipengaruhi oleh Krisis Finansial 1997 yang meluas menjadi krisis ekonomi dan melanda hampir semua negara Asia. Krisis finansial dan ekonomi ini meluas menjadi krisis politik di Indonesia yang dimulai pada pertengahan 1998. Kedua, gerakan reformasi di Indonesia merupakan awal proses demokratisasi di Indonesia, selain juga telah mengakibatkan berbagai persoalan dan gejolak internal, seperti konflik komunal dan konflik kekerasan yang terjadi di Indonesia, seperti di Ambon (Maluku), Papua dan Poso (Sulawesi Tengah). Persoalan domestik Indonesia menjadi perhatian dan kekhawatiran pemerintah dan masyarakat Australia karena lingkungan internal Indonesia yang tidak aman dan tidak stabil akan berdampak langsung pada keamanan dan stabilitas nasional Australia. Kekhawatiran itu disebabkan posisi Indonesia relatif dekat dengan Australia. Ketiga, serangan terorisme di New York pada 11 September 2001 telah "mempersatukan" negara-negara di dunia, di mana hampir setiap negara menjadikan persoalan terorisme internasional sebagai agenda utama dalam kebijakan luar negerinya, tidak terkecuali Australia dan negara-negara di Asia

Timur.[6] Perang melawan terorisme menjadi agenda politik dan keamanan yang mendominasi hampir setiap pertemuan regional dan internasional maupun dalam pembicaraan bilateral, baik antara Australia dan negara-negara Asia Timur, maupun antara Australia dengan negara-negara di kawasan lainnya.

Kerja sama perdagangan dan investasi Australia dengan negara-negara asing bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial dan ekonomi secara langsung, namun juga untuk menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang Australia yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan warga Australia. Dengan demikian, keamanan dan stabilitas nasional Australia dapat dipertahankan. Selama ini, Australia tampaknya dapat meraih keuntungan dari kerja sama yang dilakukan bersama negara atau mitra dagangnya, seperti dengan Cina, Jepang, Indonesia, dan Singapura. Namun demikian, tingkat hubungan ekonomi antara Australia dengan Cina, Jepang, dan Singapura tampak lebih setara dibandingkan posisi ekonominya terhadap Indonesia, bahkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong paling rendah. Posisi Indonesia semakin sulit dengan berbagai gejolak politik, sosial, dan ekonomi yang terjadi sejak era reformasi tahun 1998. Akibatnya, sulit bagi Indonesia untuk memberikan jaminan bagi Australia dalam menjalankan hubungan perdagangan dan melakukan investasi dengan aman di Indonesia. Padahal, jaminan keamanan menjadi syarat utama dalam melakukan pembangunan nasional maupun kerja sama perdagangan dan investasi dengan Australia serta negara-negara lainnya.

Selanjutnya, perkembangan isu terorisme yang dikaitkan dengan gerakan Islam radikal turut mempengaruhi hubungan bilateral Australia dengan negara-negara Asia Tenggara. Apalagi gerakan radikal tersebut diyakini memiliki jaringan di beberapa negara, terutama Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Berbagai peristiwa yang terkait dengan terorisme semakin mempengaruhi persepsi ancaman negara-negara di dunia. Terorisme sebagai ancaman paling mengerikan abad ini telah membawa implikasi pada sistem dan strategi pertahanan Australia yang memandang regional Asia (Asia Tenggara) sebagai sebuah wilayah bermasalah atau *A Troubled Region.*[7]

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terorisme merupakan tindakan yang direncanakan untuk mengakibatkan kematian atau secara fisik berbahaya bagi masyarakat sipil (*non-combatant*). Bioterorisme merupakan salah satu bentuk teror dengan menggunakan atau menyebarkan kejahatan biologis, seperti virus dan bakteri, sehingga menimbulkan penyakit atau kematian manusia, hewan atau tanaman ("perang kuman"). Pada abad ke-21, ancaman bioterorisme (atau penyakit infeksi serius, seperti HIV, SARS, *avian influenza,* dan virus) kian mengkhawatirkan seiring dengan meningkatnya mobilitas dan lalu lintas manusia dan barang antarnegara. Penggunaan senjata biologis dan kimia ini telah disepakati dalam konvensi senjata biologis yang mulai berlaku sejak 26 Maret 1975. Baru 22 negara meratifikasi konvensi atau kesepakatan multilateral pertama mengenai pelucutan senjata. Tujuannya melarang produksi seluruh kategori senjata, kecuali untuk tujuan medis dan pertahanan dalam skala kecil. Adapun konvensi senjata kimia baru diberlakukan sejak 29 April 1997 dan telah diratifikasi oleh 50 negara. Bioterorisme sangat berpengaruh pada tingginya angka kematian penduduk maupun hewan. Dengan demikian, bioterorisme berkaitan dengan keamanan dan stabilitas negara. Sebagai salah satu negara tujuan para imigran, Australia menyadari perlu adanya suatu konsep *human security* yang sesuai dengan kondisi Australia yang majemuk (*multicultural*).

Isu strategis yang juga mempengaruhi hubungan Australia-Asia Timur adalah masalah perbatasan, khususnya antara Australia dan Indonesia, yang tidak hanya terbatas pada keberadaan teritorial kedua negara, tetapi juga sebagai kawasan yang penuh dengan persoalan batas wilayah, eksistensi pulau-pulau perbatasan, dan persoalan pelintas batas dari wilayah Indonesia. Kedekatan geografis memberikan peluang untuk lebih melancarkan mobilitas para teroris dari satu wilayah negara ke wilayah negara lainnya. Begitupun dengan persoalan penyelundupan senjata (*arms smuggling*), *illicit drugs trafficking*, dan *human trafficking*, semakin mudah dilakukan melalui

[6] Lihat "Australia-ASEAN Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism", http://www.dfat.gov.au/globalissues/aus-asean_interr.html

[7] *Australia's National Security, A Defence Update 2003*, hlm. 18—20.

daerah perbatasan, misalnya perdagangan senjata ilegal dari Mindanao ke Maluku ataupun "kedatangan" 42 warga negara Indonesia (WNI) asal Papua ke wilayah Australia pada awal tahun 2006.

Dampak krisis Asia adalah ketidaksiapan negara-negara Asia, khususnya Indonesia dalam merealisasikan perdagangan bebas di tingkat regional Asia Tenggara yang dikenal dengan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA)[8] maupun di tingkat regional Asia Pasifik atau *Asia Pacific Economic Council* (APEC). Untuk itu Australia menempuh cara lain, yaitu melakukan perjanjian dan kerja sama pasar bebas, seperti dengan Singapura dan Thailand. Singapura merupakan negara anggota ASEAN dengan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi. Pada 2003, misalnya, tercatat pendapatan kotor (GDP) per kapita Singapura mencapai lebih dari US$ 17.000.[9] Indonesia, sejak awal 1990, merupakan pasar terbesar Australia, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang jauh di bawah Singapura. Dengan perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup besar, Australia dituntut untuk dapat menjaga hubungan ekonominya dengan Asia, terutama karena terjadinya persaingan di antara negara-negara anggota ASEAN dalam mempertahankan kerja sama perdagangan dan investasi di wilayah negara masing-masing.

Hubungan bilateral Australia dengan Singapura di bidang perdagangan dan investasi bersifat saling menguntungkan. Bahkan kedua negara sepakat untuk meningkatkan perdagangan dan investasi melalui FTA yang pada saat ini kedua negara terus melakukan negosiasi mengenai implementasi FTA. Australia juga memanfaatkan kerja sama regional ASEAN untuk mempertahankan "kehadirannya" di Asia, di mana Singapura pun merupakan salah satu negara pendiri ASEAN dan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi. Selain karena kesamaan Australia dan Singapura sebagai negara-negara anggota Persemakmuran, kedua negara juga tergabung dalam beberapa kerja sama bidang pertahanan, khususnya FPDA dan PSI.

Hubungan Australia dengan negara-negara Timur Laut, terutama Jepang merupakan hal penting bagi Australia karena Jepang merupakan salah satu mitra dagang terbesarnya setelah Uni Eropa, AS, dan New Zealand.[10] Jepang merupakan juga investor terbesar ketiga di Australia, di mana perusahaan-perusahaan Jepang mempekerjakan secara langsung sekitar 50 ribu orang Australia.[11] Selain hubungan ekonomi, hubungan keamanan antara Australia dan Jepang menjadi semakin penting, khususnya setelah tragedi 11 September. Australia adalah negara sekutu AS yang mendukung tugas internasional dalam menghadapi terorisme.[12] Bagaimana Australia membina hubungan yang sehat dengan Asia, khususnya dengan Indonesia mengingat Indonesia menjadi daerah perlintasan tindak kejahatan atau kejahatan lintas negara (*transnational crime*), termasuk terorisme.

Setelah dicanangkannya gerakan reformasi di Cina pada 1970-an dengan strategi pasar terbuka atau "Pasar Sosialisme", banyak negara memandang Cina sebagai kekuatan ekonomi besar di Asia bahkan di dunia. Para pengusaha Cina sudah memiliki jaringan bisnis yang kuat di Asia Tenggara, bahkan semakin meningkat perannya sejak awal 1990-an.[13] Jaringan bisnis Cina pun sudah sampai ke Australia, di mana semakin banyak produk Cina dapat dijumpai di pasar Australia, seperti produk pakaian jadi dan mainan anak-anak.

Masa Depan Hubungan Australia dan Asia Timur

Australia akan tetap menjadi salah satu negara sekutu AS di Asia. Namun Australia harus pandai-pandai menempatkan dirinya agar posisi tersebut tidak menjadi dilema dalam

[8] Pelaksanaan AFTA dimulai pada tahun 2003, namun diajukan menjadi tahun 2001 khusus bagi 6 negara pendiri ASEAN: Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand, kemudian pada 2010 bagi negara-negara anggota baru ASEAN: Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.

[9] Mark Vale (2004). *Trade 2004, A Statement by Minister for Trade*, Department of Foreign Affairs and Trade Australia, hlm. v. *The Singapore-Australia Free Trade Agreement* direalisasikan pada Juli 2004, sedangkan dengan Thailand diresmikan pada Oktober 2004 (*Thailand-Australia Free Trade Agreement*). Lihat juga http://www.bexi.co.id/world/south_asia/index.html.

[10] Mark Vale (2004). Figure 4, Ibid., hlm. 74.

[11] Australia's Foreign and Trade Policy White Paper (2003). *Advancing the National Interest*, hlm. 78.

[12] *Ibid.*, hlm. 77—78.

[13] Lihat Alasdair Bowe & Danny Unger (1997). *The Politics of Open Economies Indonesia, Malaysia, the Philippines and Thailand*, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 63.

hubungannya dengan negara-negara besar di Asia, melainkan dapat memainkan peranan positifnya untuk mencegah terjadinya persaingan negatif di antara negara-negara besar di Asia Pasifik. Tumbuhnya Cina sebagai adidaya ekonomi dan militer di Asia Pasifik merupakan suatu keniscayaan. Hal yang terpenting adalah jangan sampai terjadi persaingan negatif antara Cina dengan AS dan Jepang. Diterimanya Australia sebagai bagian dari *East Asia Community* juga menunjukkan betapa negara-negara *middle power* di Asia menginginkan disatupadukannya kekuatan negara-negara tersebut untuk mencegah terjadinya dominasi dari salah satu negara besar di Asia Timur Laut, Cina, atau Jepang.

Perubahan lingkungan strategis di Asia Timur menyebabkan terjadinya penyesuaian dalam politik luar negeri Australia terhadap Asia umumnya dan dalam hubungan serta kerja sama bilateral dan multilateral Australia dan negara-negara Asia khususnya. Sebaliknya, ada kecenderungan negara-negara kekuatan menengah di Asia menjadikan Australia sebagai mitra strategis untuk mencegah konflik atau dominasi dari negara-negara besar di Asia dalam kerja sama multilateral di Asia Timur.

Secara umum, Australia juga dipandang sebagai "kesempatan" baik oleh negara-negara besar maupun kekuatan menengah di Asia dalam melakukan kerja sama keamanan dan ekonomi secara bilateral maupun multilateral. Sumber daya alam, teknologi dan kedekatan Australia dengan AS menjadikan Australia memiliki posisi yang amat penting di Asia Timur, baik dari segi ekonomi maupun keamanan.

Namun, Australia juga mengandung unsur "tantangan" bagi negara-negara Asia Timur. Kepercayaan diri Australia yang teramat besar dalam menjalankan politik luar negerinya, seperti kebijakan *Pre-emptive Strike* terhadap terorisme, dan kebijakan yang tegas dalam menangani migrasi ilegal telah menimbulkan masalah dalam hubungan bilateral antara Australia dan negara-negara Asia. Tanpa adanya pemahaman dan sensitivitas Australia terhadap kepentingan negara-negara tetangganya di Asia, khususnya yang terkait dengan kebijakan politik luar negeri dan pertahanan Australia, Negeri Kanguru ini akan dipandang sebagai negara yang selalu ingin melakukan intervensi dalam persoalan domestik negara-negara tetangganya.

Dalam isu perbatasan, peran, dan posisi Australia di Asia Tenggara terkait dengan kepentingan langsung Australia. Secara umum, isu perbatasan mencakup empat hal: (1) *territorial boundary dispute*; (2) *positional boundary dispute*; (3) *resources boundary dispute*; (4) *functional boundary dispute*. Dalam konteks *territorial boundary disputes*, misalnya, bagaimana keikutsertaan Australia dalam membantu Malaysia ketika Indonesia menerapkan politik konfrontasi terhadap Malaysia pada 1963—1966 serta pandangan Australia dalam persoalan blok Ambalat. Dalam konteks *positional boundary disputes*, bagaimana Australia membantu pemetaan kepulauan Indonesia, khususnya perbatasan antara Indonesia-Papua Nugini dan juga membuat patok-patok perbatasan pada tahun 1980-an, terutama pemetaan wilayah laut dan perairan antara Indonesia dan Australia pada awal tahun 2000. Dalam konteks *resources boundary disputes*, misalnya, bagaimana Australia menangani masalah Celah Timor antara Indonesia-Australia 1979—1989 dan antara Australia dan Timor Leste saat ini. Persoalan *functional boundary disputes* juga menjadi *concern* Australia, khususnya penggunaan wilayah perbatasan Indonesia-PNG untuk aktivitas politik Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan wilayah jalur laut di Selat Malaka sebagai wilayah para perompak dan pembajak laut; selain itu juga masalah pelintas batas dari Timor Leste ke NTT.

Masa depan hubungan Australia dan Asia Timur, khususnya dengan Cina, Jepang, Singapura, dan Indonesia akan ditentukan oleh banyak hal. *Pertama*, apakah Australia masih menghadapi dilema dalam hubungan internasionalnya antara pilihan atas kedekatan historis dengan AS atau dengan kedekatan geografis dengan negara-negara Asia. Meski Australia merupakan sekutu AS di Asia, Australia harus menyadari bahwa masa depannya juga amat bergantung pada hubungan ekonomi dan keamanannya dengan Asia. *Kedua*, bagaimana Australia sebagai negara *middle power* memainkan peran positifnya di antara kepentingan AS dan negara-negara besar Asia (Jepang dan Cina) dan menempatkan dirinya sebagai penengah di antara kepentingan negara-negara besar tersebut dengan kepentingan negara-negara *middle power* Asia. *Ketiga*, Masuknya Australia atas dukungan Indonesia

sebagai anggota *East Asia Community* memberi kesempatan bagi Australia untuk menjadi bagian dari kekuatan menengah Asia yang dapat mencegah dominasi dan persaingan antara Cina dan Jepang dalam hubungannya dengan negara-negara Asia Timur lainnya. *Keempat*, meskipun Jepang dan Cina merupakan ngara-negara yang amat penting bagi Australia, Negeri Kanguru ini juga harus pandai-pandai menempatkan dirinya sebagai bagian dari kekuatan militer dan ekonomi di Asia. *Kelima*, hubungan Australia-Asia akan tetap terfokus pada persoalan keamanan (*security*) dan ekonomi. Dari sisi keamanan, persoalan-persoalan terorisme, *illegal immigrants*, perbatasan laut, keamanan jalur laut, senjata pemusnah massal akan tetap mewarnai kebijakan keamanan Australia terhadap Asia. Namun, tampaknya, Australia harus menerapkan pendekatan baru atas berbagai persoalan tersebut, tidak hanya memfokuskannya pada pendekatan keamanan dalam artian militer semata, melainkan perlunya pemahaman baru mengenai masyarakat Asia dan juga diterapkannya kebijakan untuk mengeliminasi atau paling tidak mengurangi aktivitas terorisme dengan memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara Asia. Dengan kata lain, "bantuan luar negeri" kepada negara-negara Asia merupakan bagian dari politik untuk mencegah atau mengurangi bahaya terorisme dan *illegal immigrants* ke Australia. *Keenam*, Australia sebagai salah satu negara pengekspor gas alam dan uranium memegang peranan penting dalam masa depan keamanan energi di Asia.

Daftar Pustaka

Anonim. 2007. "Australia-Asia Relations during the Cold-War, Forward Defence". http:www.Cina-biz.org, diakses pada tanggal 4 April 2007.

Anonim. 2007. "Australia-ASEAN Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism." http://www.dfat.gov.au/globalissues/aus-asean_interr.html, diakses pada tanggal 4 April 2007.

Anonim. 2007. "96272 Issues in Australia-Asia Relations". http://www.usq.edu.au/unit-1998/fullspec/96272s2d.htm, diakses pada tanggal 4 April 2007.Bowe, Alasdair dan Danny Unger. 1997. *The Politics of Open Economies Indonesia, Malaysia, the Philippines and Thailand.* Cambridge: Cambridge University Press.

Department of Foreign Affairs and Trade of Australia. 2003. *Australia's Foreign and Trade Policy White Paper: Advancing the National Interest. Australia's National Security, A Defence Update 2003.*

Department of Foreign Affairs and Trade of Australia. Maret 2005. *Singapore Country Brief.*

Department of Foreign Affairs and Trade of Australia. Oktober 2005. *Singapore Country Brief.*

Elisabeth, Adriana (Ed.) 2004. *Kebijakan Bantuan Luar Negeri Australia kepada Indonesia 1998—2003.* Jakarta: P2P LIPI.

Harris, Stuart. 2004. *Conclusion: The Theory and Practice of Regional Cooperation* dalam Andrew Mack dan John Ravenhill (Ed.). *Pasific Cooperation: Building Economic and Security Regimes in the Asia-Pasific Region.* Canberra: Allen & Unwin.

Healey, Kaye (Ed.). 1997. "Our Place in Asia", dalam *Issues for the Nineties*, Vol. 73, Sydney: the Spinney Press.

Jones, Walter S. 1993. *Logika Hubungan Internasional 2.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kuppuswamy, C.S. 18 Juni 2005. "Straits of Malacca: Security Implications". *Paper* No. 1033, *South Asia Analysis Group* (SAAG).

Lee, David. 1995. *Search for Security, the Political Economy of Australia's Postwar Foreign and Defence Policy.* Canberra: Allen & Unwin.

MINDEF Singapore. 15 Agustus 2005. "Singapore hosts Proliferation Security Initiative Exercise."

Quinlan, Gary. 2005. "Australia-Singapore Relations", Pidato sebagai High Commissioner pada *the Australian chamber of Commerce*, 19 Mei 2005, Singapura.

Rodan, Garry, Kevin Hewison dan Richard Robison. 1997. *The Political Economy of South-East Asia, An Introduction.* Melbourne: Oxford University Press.

Tewes, Alex. 2004. "Australia's Maritime Strategy in the 21st Centry". *Research Brief no. 4, 2004-2005.*

U.S. Department of State. 2005. *Media Note*, Office of the Spokesman, Washington, D.C.

Uranium Information Centre, Ltd. 2005. "Australia's Uranium".

Vale, Mark. 2004. *Trade 2004, A Statement by Minister for Trade*, Department of Foreign Affairs and Trade Australia, *The Singapore-Australia Free Trade Agreement.*

White, Brain, Richard Little dan Michael Smith (Eds.). 2001. *Issues in World Politics*. New York: Palgrave.